



**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**TAHUN 2019**

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Bab I      Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 Struktur Organisasi.....	4
Bab II      Akuntabilitas Kinerja .....	7
2.1 Visi SKPD .....	7
2.2 Misi SKPD .....	7
2.3 Tujuan SKPD .....	8
2.4 Program dan Kegiatan .....	9
Bab III     Akuntabilitas Kinerja .....	12
3.1 Pengukuran Kinerja .....	12
3.2 Analisis Kinerja.....	13
3.3 Realisasi Program dan Kegiatan .....	28
3.4 Alokasi dan Anggaran .....	39
3.5 Analisa Efisiensi .....	49
Bab IV     Penutup .....	53
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	53

## KATA PENGANTAR

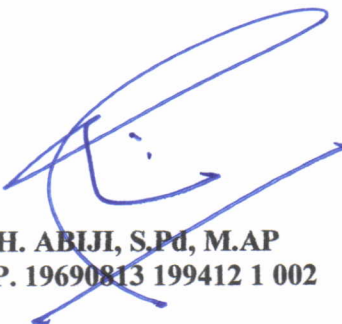
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tahun 2019 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

**Paringin,      Februari 2020**

Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Balangan



**H. ABIJI, S.Pd, M.AP**  
**NIP. 19690813 199412 1 002**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Kabupaten Balangan. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dicapai. Yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indikator yang belum terpenuhiya indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN), hal ini dikarenakan jumlah nilai investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2019 sebesar 27,99 Milyar Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) dengan realisasi 42,88 Milyar, hal ini berarti ada penurunan pada pencapaian di tahun 2019 yakni sebesar 14,89 M.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **1.3 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Kabupaten Balangan. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-



tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

### **Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

### **Fungsi**

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

- e. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- f. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- h. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4 Struktur Organisasi**

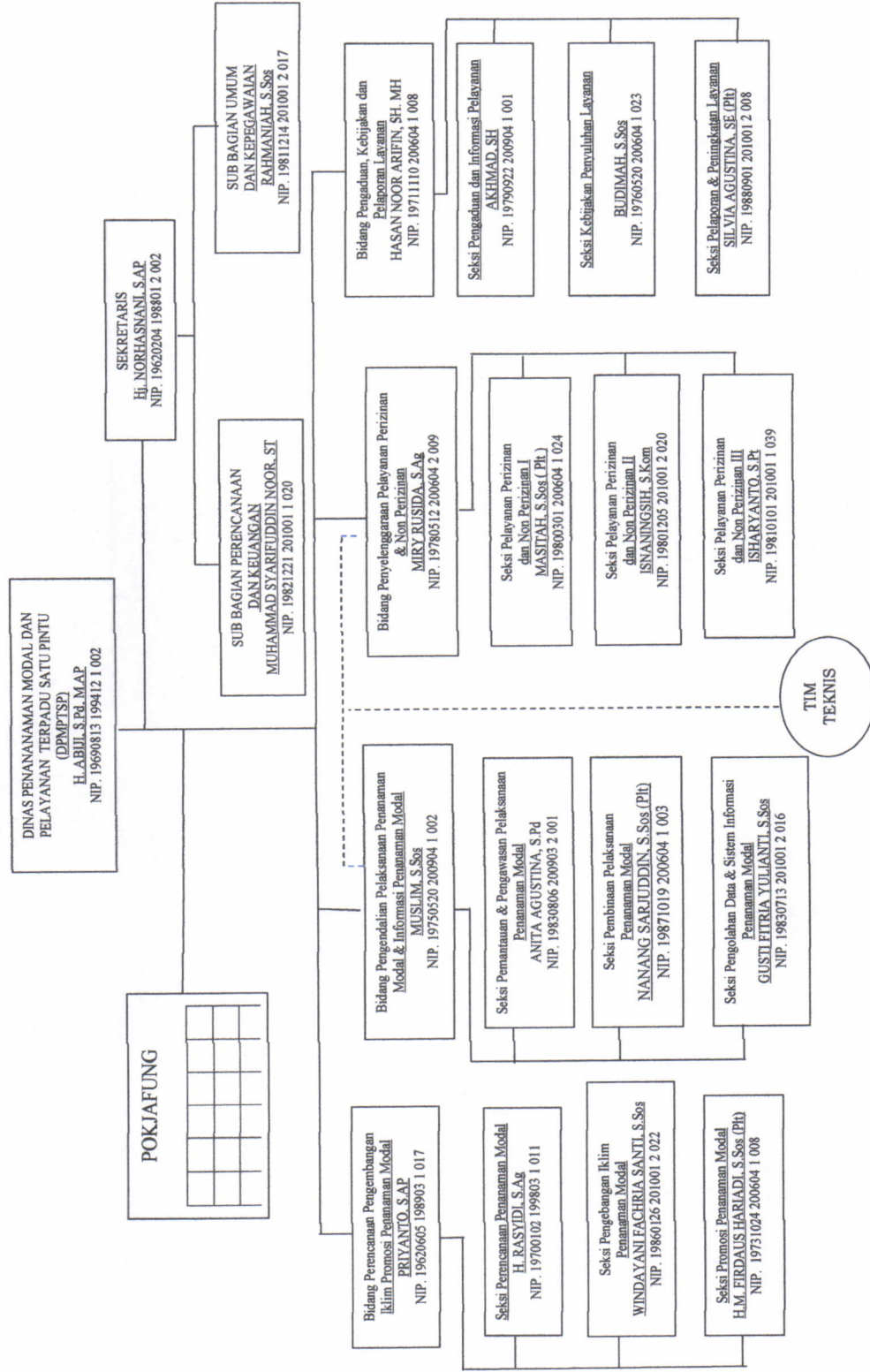
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - 3. Seksi Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - 3. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.



- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
  - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
  - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
- f. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan;
  - 2. Seksi Kebijakan Penyuluhan Layanan;
  - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- h. Tim Teknis

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BALANGAN**





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Visi SKPD**

Visi yang dibangun dan ditetapkan bersama oleh komponen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu visi DPMPTSP berpijak dari visi pemerintah kabupaten Balangan yaitu :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN DAN  
PENANAMAN MODAL YANG MUDAH, CEPAT, TRANSPARAN DAN  
TEPAT WAKTU”**

#### **2.2 Misi SKPD**

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi, sebagaimana halnya dengan visi, misi, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan pun senantiasa berusaha menunjang misi pemerintah Kabupaten Balangan, yaitu:

1. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
2. Mewujudkan perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terkoordinasi.
3. Meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur menuju aparatur yang profesional.

### 2.3 Tujuan dan Sasaran

#### Tujuan

1. Tujuan : Terwujudnya Investasi Daerah yang berkelanjutan  
Indikator Tujuan : Realisasi Investasi
2. Tujuan :Mewujudkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas  
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP

#### Sasaran

- 1.Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah  
Indikator Kinerja Sasaran : Prosentase Peningkatan Investasi Daerah
- 2.Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan  
Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.

#### A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	13 M	20 M	45 M	48 M	50 M



**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	45 M
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	83,50 % (A)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	70 (B)
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

**2.4 Program dan Kegiatan**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan peralatan kantor
- Pengadaan komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b) Pengadaan pakaian KORPRI
- c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- d) Pengadaan pakaian kedaerah

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan RKA dan DPA SKPD

**6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

- a) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah
- b) Pengembangan potensi unggulan daerah
- c) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
- d) Penyelenggaraan pameran investasi

**7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

- a) Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
- b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- c) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- d) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha di bidang investasi

**8. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan**

- a) Penyediaan jasa teknis perizinan
- b) Penyediaan, pengawasan, dan evaluasi perizinan
- c) Peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin jasa usaha
- d) Peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin tertentu

- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan

**9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik**

- a) Penyusunan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- b) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan
- c) Pengembangan aplikasi dan sistem informasi pengelolaan perizinan secara online
- d) Publikasi informasi perizinan dan penanaman modal
- e) Kajian NSPK bidang perizinan dan penanaman modal
- f) Desimilasi dan sosialisasi NSPK bidang perizinan dan penanaman modal
- g) Kodefikasi dan dokumentasi NSPK bidang perizinan dan penanaman modal



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

**3.1 Pengukuran Kinerja**

Tabel 3.1

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	45 M	27,99 M	62,2 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	83 %	93 %	112,05 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	70 (B)	69,67 (B)	99,53 %
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100%

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut

**Skala Nilai Peringkat Kinerja  
Kabupaten Balangan Tahun 2019**

Tabel 3.2

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Capaian	Kategori
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

**3.2 Analisis Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut 3 (tiga) indikator dinyatakan “**sangat tinggi**” yaitu capaiannya rata-rata  $91\% \leq 100\%$  dari target. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

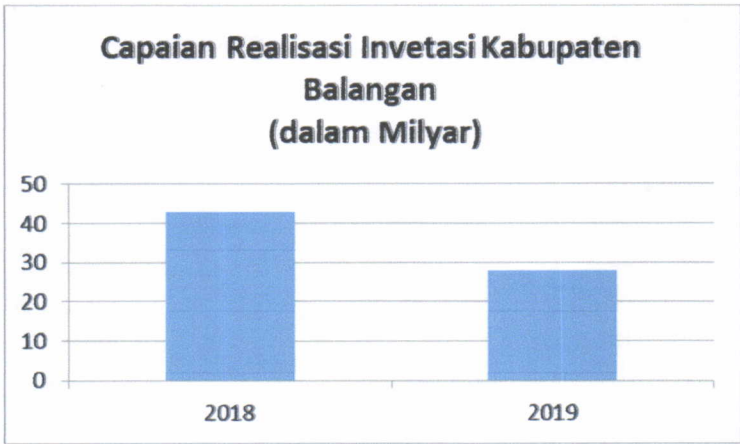
Meningkatnya Investasi Daerah

Tabel 3.3

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	45 M	27,99 M	62,2 %	Rendah

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) tahun 2019 sesuai dengan tabel 3.3 sebagai berikut :

- a. Jumlah nilai investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2019 sebagaimana tabel 3.3 adalah sebesar 27,99 Milyar Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) dengan realisasi 42,88 Milyar, hal ini berarti ada penurunan pada pencapaian di tahun 2019 yakni sebesar 14,89 M
- b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator pertumbuhan nilai investasi penanaman modal dalam negeri ini dapat dikatakan rendah.



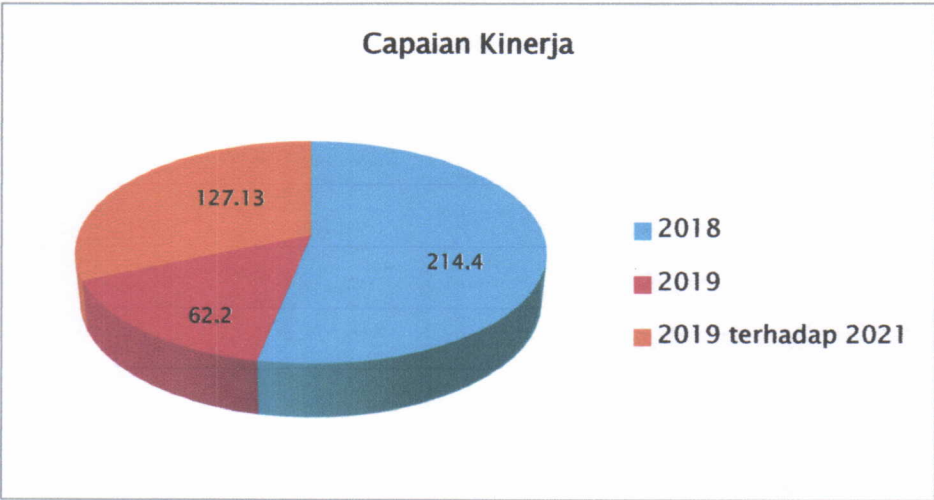
Grafik 3.1 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)



Tabel 3.4

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	214,4 %	45 M	27,99 M	62,2 %	127,13 %
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>62,2 %</b>	<b>127,13%</b>

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja indikator pertumbuhan nilai penanaman modal dalam negeri tahun 2019 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2021 sebagaimana tabel 3.4 maka sudah mencapai angka 127,13 %.
- b. Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2019 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM adalah sebesar Rp.27.988.279.555,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2018 Realisasi investasinya sebesar Rp.42.882.712.314,00 (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah). Disini terjadi mengalami penurunan sebesar 34.73% dari tahun 2018.



Grafik 3.2 Capaian Kinerja Peningkatan Investasi Daerah (PMDN)

**Faktor-faktor yang mempengaruhi**

1. Target pencapaian kinerja ini diambil berdasarkan hasil realisasi investasi yang sudah dilaporkan oleh pelaku usaha pada aplikasi LKPM online yang sudah disetujui oleh BKPM. Penyampaian LKPM ini dilakukan secara mandiri oleh setiap pelaku usaha setiap triwulan atau 3 bulan sekali.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM adalah yang sudah memiliki NIB dan mempunyai modal usaha Rp 500.000.000,00 keatas. Dari data OSS jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan yang wajib menyampaikan LKPM dengan modal Rp 500.000.000,00 ke atas pada tahun 2019 adalah 41 pelaku usaha dengan total rencana investasi Rp 57.580.000.000,00.
3. Jumlah perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM tahun 2019 sebanyak 17 perusahaan, hal tersebut dikarenakan ada masih beberapa pelaku usaha yang masih berada dalam tahap periode pelaporan karena mereka mendaftarkan NIB nya pada periode pelaporan triwulan IV yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2019.

## **Permasalahan/Hambatan**

### **1. Kendala internal**

- Secara kuantitas, Sumber Daya Manusia yang ada sangat kurang untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- Kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia yang ada dalam penguasaan Informasi dan Teknologi Komputer.
- Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan secara langsung.

### **2. Kendala eksternal**

- Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban mereka dalam menyampaikan LKPM.
- Pelaku usaha masih kurang memahami dalam menggunakan aplikasi LKPM online
- Sulitnya menghubungi pelaku usaha karena nomor yang didaftarkan untuk mengurus NIB kadang tidak aktif.
- Tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah daerah bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM.
- Pada tahun 2019 jumlah rencana investasi tidak dapat direalisasikan semua karena pelaku usaha hanya dapat menyampaikan realisasi investasinya terhitung 3 bulan setelah terbitnya NIB mereka, dan nilai realisasi yang akan dilaporkanpun tidak dapat semuanya karena jika mereka melaporkan semuanya maka untuk periode selanjutnya mereka harus melakukan ijin perluasan ataupun ijin produksi.
- Beberapa pelaku usaha perumahan yang memiliki rencana investasi besar pada tahun 2018 sudah direalisasikan semuanya sehingga pada tahun 2019 mereka hanya menambahkan rencana investasi untuk perluasan lahan sehingga rencana investasinya tidak terlalu besar.

## **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada untuk lebih bekerja keras mengumpulkan dan mengolah data yang terdapat dalam LKPM.



2. Melakukan survey langsung ke Perusahaan yang tidak melakukan entry data LKPM dan mendorong perusahaan supaya melaksanakan entry data LKPM terhadap jumlah investasi yang telah dilakukan.
3. Meminta data yang diperlukan untuk dilakukan entry data LKPM di Dinas DPMPTSP. (Strategi jemput bola).
4. Perlu melakukan rasionalisasi mekanisme perhitungan capaian nilai investasi penanaman modal dalam negeri disamping penguatan pada sektor pendataan agar indikator yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

**Sasaran 2**

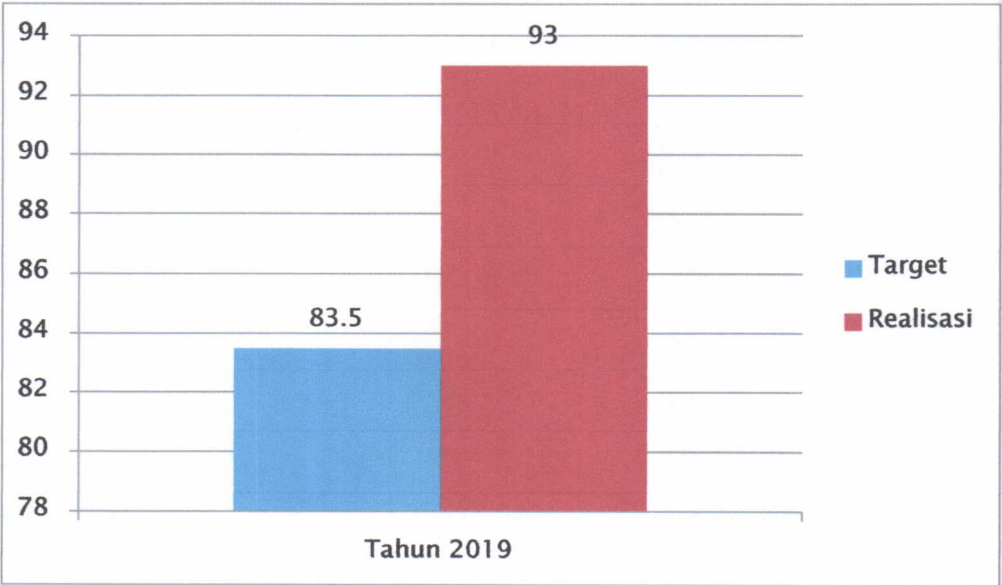
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**

Tabel 3.5

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	83,50 % (A)	93 % (A)	111,38 %	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan tahun 2019 sesuai dengan tabel 3.5 sebagai berikut:

- a. Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan tahun 2019 sebagaimana tabel 3.5 adalah sebesar 111,38 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) hanya mencapai angka 102,57 %, hal ini berarti ada kenaikan pada pencapaian di tahun 2019 yakni sebesar 8,81%.
- b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan dapat dikatakan sangat tinggi.

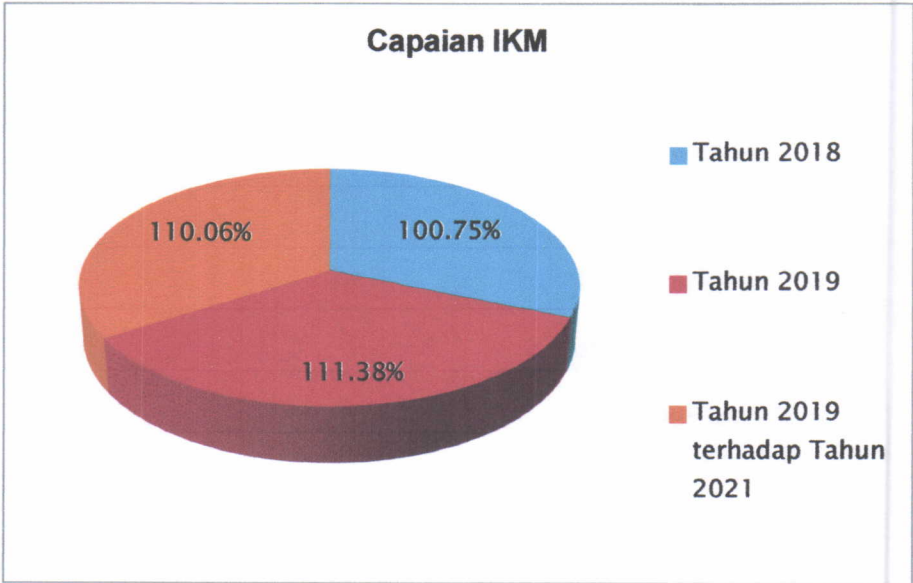


Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan

Tabel 3.6

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	100,75 %	83,50 % (A)	93 % (A)	111,38 %	110.06 %
Rata-rata Capaian				111,38 %	110.06%

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja indikator pertumbuhan nilai penanaman modal dalam negeri tahun 2019 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2021 sebagaimana tabel 3.6 maka sudah mencapai angka 110,06 %.
- b. Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2019 yang di dapat dari Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 93% (A). Sedangkan untuk tahun 2018 Realisasi nilai IKM sebesar 85,13 % (A). Disini terjadi peningkatan nilai IKM sebesar 7,87 %. Kenaikan nilai IKM ini melebihi dari target Renstra DPMPTSP tahun 2016-2021 sebesar 84,50 %.



Grafik 3.4 Capaian IKM

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Secara keseluruhan nilai IKM ini terlihat dari unsur pelayanan tidak ada yang baik, kurang baik atau tidak baik, hanya saja perlu dipertahankan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Ruang pelayanan telah sesuai dengan standar kenyamanan dan fasilitas ruang pelayanan, telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu yang dilengkapi dengan pendingin ruangan yang baik, ruang membaca, dan plakat-plakat informasi mengenai pelayanan, serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.

**Permasalahan/Hambatan**

Tidak ada permasalahan pada survey dan penyusunan laporan IKM tahun ini.

**Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.



2. Kinerja personil petugas pelayanan dipertahankan dengan melakukan Bimtek Excelent service dalam hal pelayanan personil sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan.

**Sasaran 3**

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja**

Tabel 3.7

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2018			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	70 (B)	69,67 (B)	99,53 %	Sangat Tinggi
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, untuk sasaran strategis ketiga yaitu “ *Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja*” capaiannya sebesar 100%. Capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama ini didukung dengan adanya kinerja dari Sekretariat dimana yang bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU Esselon 3 ini adalah Sekretaris. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

1. Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.8

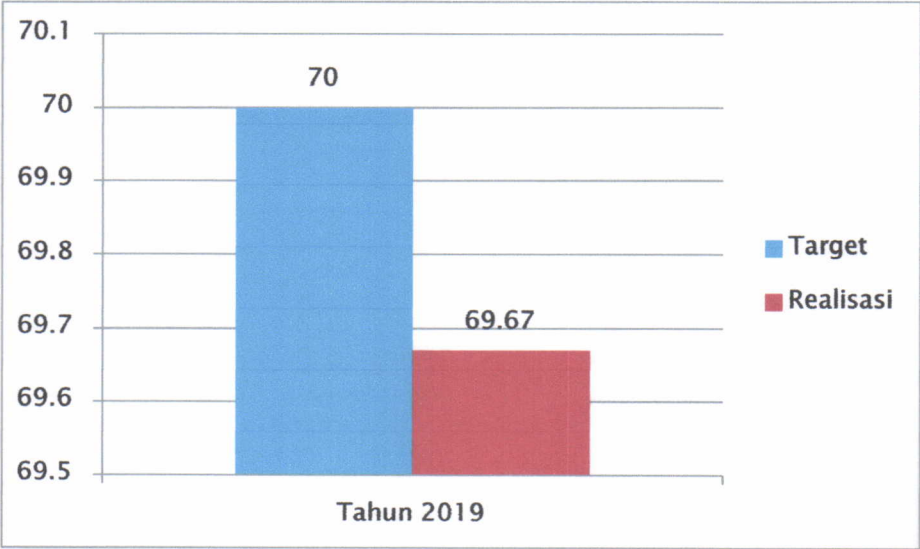
INDIKATOR	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	71,17 %	70 (B)	69,67 (B)	99,53 %	98,13 %
Rata – rata Capaian				99,53 %	98,13 %

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 69,67 dengan kategori B atau Baik. Jadi untuk indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 99,53 % dengan target nilai B (70) dan terealisasi dengan nilai B (69,67).

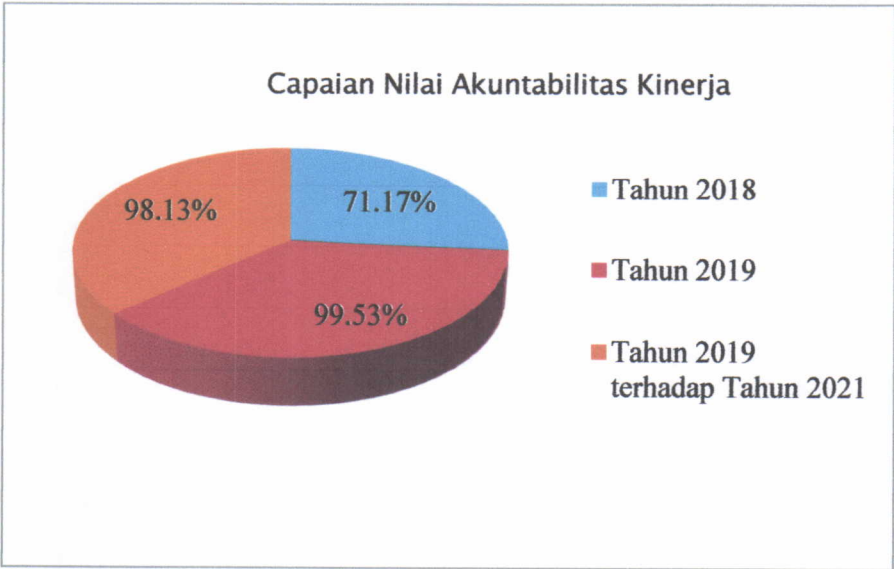
Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja adalah :

Formula Perhitungan
Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kab. Balangan

Nilai sebesar 69,67 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, yaitu penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.



Grafik 3.5 Target Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja



Grafik 3.6 Capaian Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja



### **Permasalahan/Hambatan**

Dalam laporan hasil evaluasi SAKIP, terdapat beberapa permasalahan yang masih ada diantaranya :

1. Target dari tujuan belum dijabarkan secara tersendiri dan masih digabung dengan target sasaran.
2. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala, dimana reviu dilakukan hanya dilakukan apabila ada penyesuaian Renstra Kabupaten.
3. PK masih belum sepenuhnya menyajikan IKU.
4. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dijadikan bahan penilaian bagi pegawai yang bersangkutan.
5. SOP yang ada belum menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan data.
6. Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid).
7. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment.
8. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja belum dilaksanakan.

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

#### **a. Perencanaan Kinerja**

1. Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala.
2. Melakukan monitor pencapaian rencana aksi secara berkala.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

1. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara (bulanan/triwulan/semester).
2. Mengembangkan pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi.

- Hasil pengukuran (capaian) digunakan sebagai bahan pemberian penghargaan dan sanksi.
- Melakukan reviu IKU secara berkala

**c. Pelaporan Kinerja**

- Pada Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang pencapaian IKU.
- Memanfaatkan informasi kinerja sebagai perbaikan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta memuat laporan kinerja ke dalam website.

**d. Evaluasi Internal**

Melakukan evaluasi internal terhadap rencana aksi yang telah dilakukan, melakukan pemantauan pencapaian kinerja disertai dengan hambatannya, serta mengkomunikasikan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

**e. Pencapaian Kinerja**

Mempertahankan target-target yang sudah tercapai dan meningkatkan capaian kinerja atas target-target kinerja yang belum tercapai serta agar informasi mengenai data kinerja dapat diandalkan/dipercaya, namun perlu ditambah agar selanjutnya dimasukkan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

**2. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti**

Tabel 3.9

INDIKATOR	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Rata – rata Capaian				100%	

Untuk indikator “*Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti* “ capaian kinerja sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

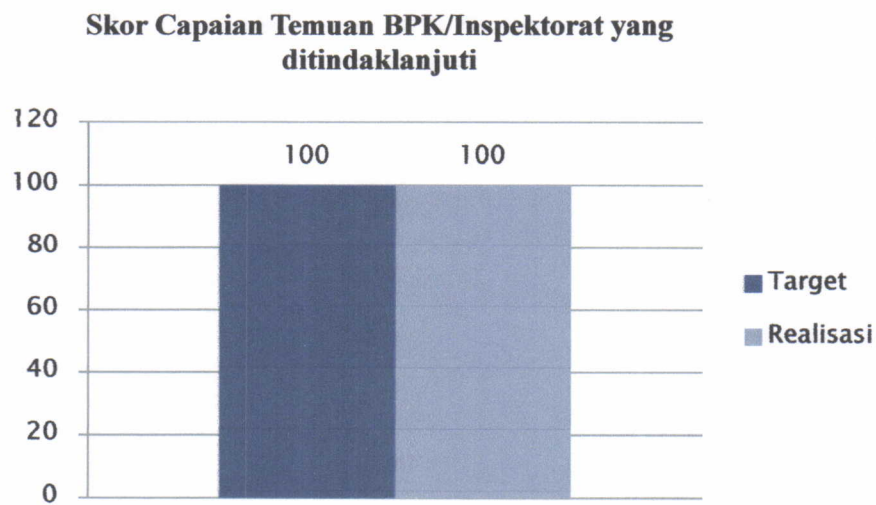
Berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) baik dari Inspektorat maupun dari BPK semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dengan adanya rekomendasi LHP ini memberikan motivasi dan juga pelajaran tentang pengelolaan keuangan daerah supaya kedepannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat meminimalisir kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari capaian Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah:

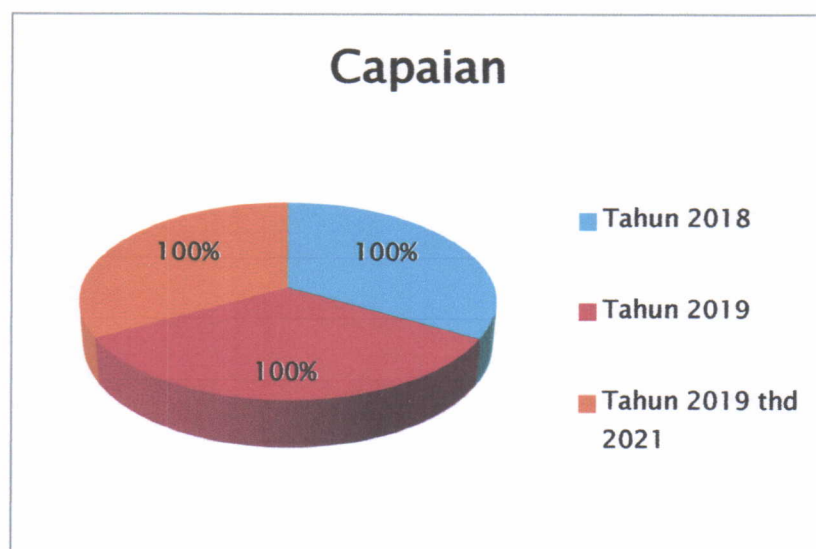
Formula Perhitungan
Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Indikator Sasaran pertama “**Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti**” didukung oleh capaian kinerja Esselon 3 (Sekretaris) dengan indikator kinerja “Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP”. Capaian kinerja indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP capaiannya sebesar 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pada Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan telah menyusun Laporan Keuangan dalam hal ini adalah Laporan Keuangan TA. 2019. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2019 telah disusun sesuai SAP yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang jika diuraikan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas, 5) Neraca, 6) Laporan Arus Kas, 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.



Grafik 3.7 Target Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti



Grafik 3.10 Capaian Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti



### **3.3 Realisasi Program dan Kegiatan.**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

##### **a. Penyediaan jasa surat menyurat**

- Tujuan : Menyediakan kelengkapan dan layanan surat – menyurat sehingga terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
- Output : Tersedianya jasa surat menyurat dan kelengkapannya.
- Realisasi kegiatan fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu perlengkapan surat-menyurat seperti amplop, perangko, materai serta benda – benda pos lainnya.

##### **b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik**

- Tujuan : Menyediakan jaringan telepon kantor, jaringan internet, air bersih dan listrik di lingkungan.
- Output : Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- Realisasi kegiatan fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu terbayarnya jasa telepon, jasa layanan internet, air dan listrik.

##### **c. Penyediaan Jasa administrasi keuangan**

- Tujuan : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan
- Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya 1 orang petugas Customer Service dan 7 Frontliner pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### **d. Penyediaan jasa kebersihan kantor**

- Tujuan : Menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan kebersihan kantor.
- Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya 2 orang petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan dan lain-lain

##### **e. Penyediaan alat tulis kantor**

- Tujuan : Menyediakan alat tulis kantor dalam rangka kelancaran kegiatan administrasi DPMPTSP
- Output : Tersedianya alat tulis kantor

- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya bahan pakai habis alat tulis kantor.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Tujuan : Menyediakan barang cetak dan penggandaan untuk administrasi perkantoran.
  - Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu pencetakan, fotokopi, cetak brosur-brosur, banner dan lain-lain
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Tujuan : Menyediakan instalasi listrik dalam rangka menunjang operasional kegiatan di DPMPSTSP.
  - Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya jaringan instalasi listrik, kabel-kabel, dan peralatan listrik lainnya lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk menunjang kelancaran pekerjaan terutama bagian pelayanan.
- h. Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan
- Tujuan : Menyediakan bahan bacaan dan perundang – undangan untuk memperlancar pengetahuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Output : Tersedianya bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu tersedianya layanan koran dari 2 jenis koran harian dengan rincian 1 harian 2 eks/hari dan 1 harian 1 eks/hari dan buku bacaan dan perundang-undangan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- Tujuan : Menyediakan menyediakan makan dan minum rapat dan juga untuk tamu-tamu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Output : Tersedianya makanan dan minuman

- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyediaan snack untuk rapat dan tamu.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Tujuan : Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan rapat-rapat keluar daerah.
  - Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu Kegiatan Koordinasi dan rapat-rapat keluar daerah ini dianggarkan dengan target 12 bulan kegiatan.
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Tujuan : Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan rapat-rapat dalam daerah
  - Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu Kegiatan Koordinasi dan rapat-rapat dalam daerah ini dianggarkan dengan target 12 bulan kegiatan.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

- a. Pengadaan mebeuler
- Tujuan : Menyediakan pengadaan mebeuler untuk kelancaran kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Output : Tersedianya mebeuler.
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu lemari 4 buah, gorden 1 paket, kulit kursi 15 buah telah tersedia dan dapat digunakan sebagaimana mestinya
- b. Pengadaan peralatan kantor
- Tujuan : Menyediakan peralatan kantor untuk kelancaran kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Output : Tersedianya peralatan kantor.

- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu penghancur kertas ada tempat bermain anak 1 set, microphone 1 paket, kursi roda 1 buah, bendera dan umbul-umbul 2 set dan neon box 1 paket telah tersedia dan dapat digunakan sebagaimana mestinya
- c. Pengadaan Komputer
- Tujuan : Menyediakan komputer beserta perlengkapannya untuk kelancaran kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Output : Tersedianya komputer
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu notebook sebanyak 3 buah.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Tujuan : Menyelenggarakan pemeliharaan rutin/berkala gedung DPMPTSP
  - Output : Terpeliharanya gedung kantor
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi pemeliharaan peralatan – peralatan gedung kantor seperti servis AC, servis genset dan peralatan kantor lainnya .
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Tujuan : Menyelenggarakan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor.
  - Output : Terpeliharanya rutin berkala kendaraan dinas/operasional
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi servis rutin, penggantian suku cadang, penyediaan bahan bakar minyak dan penggantian oli serta pembayaran pajak mobil dan kendaraan dinas serta ditambah 1 orang sopir selama 1 tahun.
- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Tujuan : Menyelenggarakan pemeliharaan rutin/berkala gedung DPMPTSP
  - Output : Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor



- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi pengecatan gedung kantor, pemeliharaan atap kantor dan pengecoran halaman kantor

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Tujuan : Menyediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk aparatur DPMPTSP
  - Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi pengadaan pakaian dinas harian 40 stell.
- b. Pengadaan KORPRI
  - Tujuan : Menyediakan pakaian KORPRI untuk aparatur DPMPTSP
  - Output : Tersedianya pakaian KORPRI
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu pengadaan pakaian KORPRI 38 stell.
- c. Pengadaan khusus hari-hari tertentu
  - Tujuan : Menyediakan pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur DPMPTSP
  - Output : Tersedianya pakaian Khusus hari-hari tertentu
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu pengadaan pakaian khusus DPMPTSP 24 stell.
- d. Pengadaan pakaian kedaerahan
  - Tujuan : Menyediakan pakaian kedaerahan untuk aparatur DPMPTSP
  - Output : Tersedianya pakaian kedaerahan
  - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu pengadaan pakaian sasirangan 40 stell.

#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Tujuan : Tersebarnya pengetahuan sumber daya aparatur
- Output : Terlaksananya bimbingan teknis implemetasi peraturan perundang - undangan
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu untuk kemajuan pengetahuan aparatur yang mana ditargetkan yang mengikuti sebanyak 24 orang.

#### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

##### **a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

- Tujuan : Terlaksananya penyusunan Renja, Renja Perubahan, LKjP, LPPD dan Laporan Keuangan
- Output : Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, LKjP, LPPD dan Laporan Keuangan
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi penyelenggaraan penyusunan dokumen Renja, Renja Perubahan, LKjP, LPPD dan Laporan Keuangan

##### **b. Penyusunan RKA dan DPA SKPD**

- Tujuan : Terlaksananya pelaporan RKA dan DPA
- Output : Tersusunnya RKA, dan DPA SKPD DPMPTSP
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % yaitu meliputi penggandaan, fotokopi, dan penjilidan, ATK serta makan minum rapat penyusunan dokumen RKA dan DPA.

## **6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Sasaran Program ini adalah persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

### **a. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah**

- Tujuan : persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
- Output: Terlaksananya kerjasama antar usaha besar dan usaha kecil menengah
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu sosialisasi antar pengusaha besar dan UMKM.

### **b. Pengembangan potensi unggulan daerah**

- Tujuan : persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
- Output : Terlaksananya penyusunan dokumen potensi daerah
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 50 %, hal ini disebabkan pada target Renja sebanyak 2 dokumen, namun pada pagu anggaran tidak mencukupi untuk penyusunan 2 dokumen.

### **c. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal**

- Tujuan : Persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
- Output : Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu tersusunnya dokumen RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal).

### **d. Penyelenggaraan Pameran Investasi**

- Tujuan : Persentase kerjasama pemberdayaan dunia usaha yang ditindak lanjuti
- Output : Terlaksananya pameran investasi
- Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 100 % yaitu kegiatan pameran investasi tingkat Kabupaten sebanyak 1 kali.

## **7. Program Peningkatan Iklim Invetasi dan Realisasi Investasi**

Sasaran Program ini adalah meningkatnya nilai investasi daerah. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
  - Tujuan : Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
  - Output : Terlaksananya Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu penyusunan buku perkembangan penanaman modal kabupaten balangan tahun 2019. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi yakni dengan adanya kerjasama yang baik dan dukungan dari semua pihak dalam proses pengambilan dan penyusunan data sampai menjadi sebuah dokumen/buku.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Tujuan : Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
  - Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal.
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu data capaian nilai realisasi investasi penanaman modal khususnya data realisasi investasi
- c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Tujuan : Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
  - Output : Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Realisasi Fisik kegiatan sebesar 240 % yaitu Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) lebih banyak dibandingkan target kinerja yang telah direncanakan.



d. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha dibidang investasi

- Tujuan : Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
- Output : Terlaksananya Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha di Bidang Investasi
- Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 84,58% yaitu kegiatan sosialisasi dengan narasumber dari BKPM Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Balangan yang menerima sosialisasi sebanyak 203 orang dengan target kinerja sebanyak 240 orang. Target kinerja tidak dapat tercapai 100 % disebabkan sebagian pelaku usaha tidak dapat menghadiri kegiatan sosialisasi karena menghadiri kegiatan lain yang jadwalnya berbarengan dengan kegiatan yang kami laksanakan.

#### **8. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan**

Sasaran Program ini adalah meningkatnya Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

##### **a. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan dan Non Perizinan**

- Tujuan : Tersedianya Kelengkapan Teknis dan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
- Output : Tersedianya Buku Saku Perizinan
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

##### **b. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan**

- Tujuan : Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP
- Output : Jumlah Hasil Rapat Tim Pembina dan Tim Teknis yang ditindaklanjuti

- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- c. Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian izin usaha
- Tujuan : Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP
  - Output : Terlaksananya pemenuhan permohonan perizinan usaha
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu semua permohonan Perizinan usaha yang memerlukan tinjau lapangan telah terfasilitasi oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian izin tertentu
- Tujuan : Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP
  - Output : Terlaksananya pemenuhan permohonan perizinan tertentu
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu semua permohonan Perizinan tertentu yang memerlukan tinjau lapangan telah terfasilitasi oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perizinan
- Tujuan : Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP
  - Output : Terlaksananya Evaluasi Perizinan
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu Jumlah Perizinan yang terevaluasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik**

Sasaran Program ini adalah Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat. Realisasi kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- Tujuan : Tersusunnya dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - Output: Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan Target nilai IKM 83,5 % ,telah memperoleh hasil survey IKM senilai 93%. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi yakni dengan mengisi kuisioner survey IKM maka dapat mengukur kinerja pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kab. Balangan .
- b. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan
- Tujuan : Tertanganinya Pengaduan yang masuk di DPMPTSP
  - Output : Terbentuknya Jumlah Unit Penanganan Pengaduan
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan.
- c. Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan secara Online
- Tujuan : Terlaksananya Perizinan yang diproses secara Online
  - Output : Jumlah Perizinan Perizinan yang diproses secara Online
  - Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu Jumlah izin yang diproses secara online melalui system OSS dan Si CANTIK Cloud.
- d. Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
- Tujuan : Tersebar nya Informasi Perizinan dan penanaman Modal
  - Output : Jumlah Informasi Perizinan dan penanaman Modal
  - Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 100% yaitu Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui Videotron, Brosur, Leaflet dan Spanduk.

- e. Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
  - Tujuan : Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik
  - Output : Jumlah Naskah Akademik NSPK (NSPK)
  - Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 0 % karena pihak ketiga tidak dapat memenuhi syarat administrasi dikarenakan waktu anggaran akan berakhir dan untuk tahun selanjutnya Anggaran dipindahkan.
- f. Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
  - Tujuan : Terlaksananya Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
  - Output : Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
  - Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 100 % , kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kecamatan Paringin, Paringin Selatan , Awayan dan di aula DPMPTSP Kab. Balangan.
- g. Kodifikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang perizinan dan Penanaman Modal
  - Tujuan : Terdokumentasinya NSPK Bidang perizinan dan Penanaman Modal
  - Output : Jumlah NSPK yang didokumentasikan
  - Realisasi Fisik Kegiatan sebesar 50 % karena SP dan SOP tidak disusun sehingga untuk jilid dan penggandaannya tidak terealisasi

### **3.4 Alokasi dan Anggaran**

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp 500.000,00 dibandingkan anggaran pendapatan 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 atau terealisasi



sebesar 1 %. Realisasi pendapatan daerah ini berasal dari Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 6.576.243.449,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 6.971.217.025,00. Realisasi belanja daerah ini 94,33 % berasal dari :

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 6.427.420.349,00 atau terealisasi 94,26 % yang terdiri dari :

1). Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 3.340.780.446,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 3.471.217.025,00 atau terealisasi sebesar 96,24 %

2). Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 3.086.639.903,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 3.347.500.000,00 atau terealisasi sebesar 92,21 %

b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 148.823.100,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 152.500.000,00 atau terealisasi sebesar 97,59 %, terdiri dari :

1). Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 148.823.100,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 152.500.000,00 atau terealisasi sebesar 97,59 %

2). Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp 0,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0 %

3). Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 0,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0 %.

Pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) program Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan sepanjang tahun ini. Dari semua program tersebut akan coba dijabarkan akuntabilitas kinerjanya sepanjang tahun 2019.

## **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

### **➤ Penyediaan jasa surat menyurat**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat adalah senilai Rp 5.100.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 5.100.000,00 atau sebesar 100%.

### **➤ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah senilai Rp 102.400.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 91.013.444,00 atau sebesar 88,88 %.

### **➤ Penyediaan Jasa administrasi keuangan**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan adalah senilai Rp 205.200.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 194.600.000,00 atau sebesar 94,83 %.

### **➤ Penyediaan jasa kebersihan kantor**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah senilai Rp 33.600.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 33.600.000,00 atau sebesar 100%.

### **➤ Penyediaan alat tulis kantor**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan alat tulis kantor adalah senilai Rp 68.720.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 67.387.000,00 atau sebesar 98,06 %.

### **➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah senilai Rp 57.265.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi

sampai dengan triwulan IV 2018 sebesar Rp 57.265.000,00 atau sebesar 100 %.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah senilai Rp 20.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 atau sebesar 100%.
- Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan adalah senilai Rp 4.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 4.000.000,00 atau sebesar 100 %.
- Penyediaan makanan dan minuman  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah senilai Rp 18.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 18.000.000,00 atau sebesar 100 %.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah senilai Rp 878.500.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 878.500.000,00 atau sebesar 100 %.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah adalah senilai Rp 145.800.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 145.690.000,00 atau sebesar 99.92 %.



## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

### **➤ Kegiatan pengadaan mebeleur**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Mebeleur adalah senilai Rp 11.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 11.000.000,00 atau sebesar 100 %.

### **➤ Pengadaan peralatan kantor**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan peralatan kantor adalah senilai Rp 78.300.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja modal, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 78.225.000,00 atau sebesar 99,90 %.

### **➤ Pengadaan Komputer**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Komputer adalah senilai Rp 99.900.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 99.900.000,00 atau sebesar 100 %.

### **➤ Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor adalah senilai Rp 209.550.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp. 208.300.000,00 atau sebesar 99,40 %.

### **➤ Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional adalah senilai Rp 135.300.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 135.285.124,00 atau sebesar 99,99 %.

### **➤ Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor adalah senilai Rp 73.000.000,00 yang



semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 73.000.000,00 atau sebesar 100 %.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

#### **➤ Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah senilai Rp 20.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 atau sebesar 100%.

#### **➤ Pengadaan Pakaian KORPRI**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI adalah senilai Rp 19.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 19.000.000,00 atau sebesar 100%.

#### **➤ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu adalah senilai Rp 25.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 25.000.000,00 atau sebesar 100%.

#### **➤ Pengadaan pakaian kedaerahan**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan pakaian kedaerahan adalah senilai Rp. 20.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 atau sebesar 100%.

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

#### **➤ Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan adalah senilai Rp 184.000.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian

realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 183.099.730,00 atau sebesar 99,51 %.

#### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah senilai Rp 42.500.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 42.499.637,00 atau sebesar 99,99 %.

- Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD adalah senilai Rp 9.550.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 9.550.000,00 atau sebesar 100%.

#### **6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

- Kegiatan Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah adalah senilai Rp 15.560.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 15.560.000,00 atau sebesar 100 %.

- Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah adalah senilai Rp 28.540.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 27.540.000,00 atau sebesar 96,50 %.

- Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal adalah senilai Rp 86.090.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 83.590.000,00 atau sebesar 97,10 %.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi adalah senilai Rp 72.010.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 70.170.000,00 atau sebesar 97,44 %.

#### **7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi**

- Kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah adalah senilai Rp 52.400.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 50.050.000,00 atau sebesar 95,52 %.
- Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan  
Dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah senilai Rp 22.895.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 22.780.000,00 atau sebesar 99,50 %.
- Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah senilai Rp 27.680.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 27.680.000,00 atau sebesar 100 %.
- Kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha di bidang investasi



Dana yang dialokasikan untuk kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha di bidang investasi adalah senilai Rp 46.780.000,00 yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, dan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV 2019 sebesar Rp 43.180.000,00 atau sebesar 92,30 %.

#### **8. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan**

➤ Kegiatan Penyediaan jasa teknis perizinan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa teknis perizinan adalah senilai Rp 16.350.000,00 yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 16.350.000,00 atau sebesar 100 %.

➤ Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perizinan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perizinan adalah senilai Rp 145.165.000,00 yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 137.218.100,00 atau sebesar 94,53 %.

➤ Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Usaha

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Usaha adalah senilai Rp 3.600.000,00 yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 600.000,00 atau sebesar 16,67 %.

➤ Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Tertentu

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Usaha adalah senilai Rp 3.605.000,00 yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 0 atau sebesar 0 %.



## **9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik**

### **➤ Kegiatan Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah senilai Rp 40.950.000,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 40.800.000,00 atau sebesar 99,63 %.

### **➤ Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah senilai Rp 62.400.000,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 28.800.000,00 atau sebesar 46,15 %.

### **➤ Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Data Perizinan**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Data Perizinan adalah senilai Rp 83.850.000,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 82.490.000,00 atau sebesar 98,38 %.

### **➤ Kegiatan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 73.375.000,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 64.875.000,00 atau sebesar 88,42 %.

### **➤ Kegiatan Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal**

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 141.550.000,00 yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 0 atau sebesar 0 %.

- Kegiatan Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 60.865.000,00 yang dialokasikan untuk belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 51.065.000,00 atau sebesar 83,90 %.

- Kegiatan Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal adalah senilai Rp 40.800.000,00 yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Realisasi sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2019 sebesar Rp 28.000.000,00 atau sebesar 68,63 %.

### 3.5 Analisis Efisiensi

Tabel 3.10 Efisiensi Anggaran

Sasaran	IndikatorSasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	IndikatorKegiatan	Anggaran (Rp)	Relevan (Ya/Tdk)
Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	27.680.000	ya
Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi realisasi investasi	22.895.000	ya
Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Penyusunan system informasi penanaman modal di daerah	Jumlah data dan informasi penanaman modal	52.400.000	ya

Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha di bidang investasi	Jumlah pelaku usaha yang menerima sosialisasi	46.780.000	Ya
-------------------------------	--	---	--	--	---	------------	----

- Penjelasan :
- Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sangat relevan dengan pencapaian indikator utama karena melalui kegiatan ini pelaku usaha akan diberikan pengetahuan tentang Peraturan Perka BKMP nomor 7 tahun 2018 tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjelaskan tentang kewajiban para pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha dapat memahami dan mengerti serta dapat menjalankan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Jika mereka tidak melaporkan LKPM maka nilai capaian realisasi tidak akan ada. Kegiatan ini merupakan pengetahuan dasar setiap pelaku usaha mengenai LKPM, melalui kegiatan ini juga mereka akan mengetahui sanksi apa saja yang akan mereka dapat jika mereka tidak menyampaikan LKPM.
  - Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan sangat relevan dengan pencapaian indikator utama karena melalui kegiatan ini setiap pelaku usaha dimonitoring, diawasi dan dipantau setiap periode pelaporan. Setiap pelaku usaha diwajibkan menyampaikan LKPM nya setiap triwulan atau 3 bulan sekali, jika ada pelaku usaha yang tidak melaporkan maka akan segera ditindak lanjuti untuk dibina. Melalui kegiatan ini capaian realisasi juga dapat dikontrol agar pelaku usaha dapat menjalankan usaha mereka dengan baik tanpa meninggalkan kewajiban mereka menyampaikan LKPM. Dalam kegiatan ini juga setiap pelaku usaha akan dibimbing untuk menyampaikan LKPM mereka jika mengalami kendala ataupun kesulitan dalam menyampaikan realisasi investasinya.
  - Kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah sangat relevan dengan pencapaian indikator utama karena melalui kegiatan



tersebut diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan realisasi investasi pertahun di Kabupaten Balangan yang disajikan dengan bentuk cetak.

- Kegiatan Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha di bidang investasi sangat relevan dengan pencapaian indikator utama karena melalui kegiatan ini setiap pelaku usaha akan mendapatkan bimbingan teknis mengenai cara-cara mengisi dan melaporkan LKPM. Mereka diajarkan untuk melaporkan sendiri LKPM nya dengan menggunakan akun sendiri. Setiap pelaku usaha akan terus dibina untuk menjalankan kewajiban mereka melalui kegiatan kunjungan rutin. Melalui kegiatan ini mereka dapat berkonsultasi dan sharing mengenai permasalahan dan kendala yang mereka hadapi dalam melaporkan LKPM sehingga dapat diberikan solusi untuk memecahkan persoalan tersebut yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan realisasi penyampaian LKPM.



ANALIS PERBANDINGAN DENGAN PROVINSI

No.	Indikator Utama	Capaian 2018	Capaian 2019	Kualifikasi peringkat capaian 2019	Penurunan/ kenaikan kinerja (2018 terhadap 2019)	Capaian 2019 terhadap 2021	Capain 2019 terhadap Pemerintah Propinsi	Capain 2019 terhadap Pemerintah Nasional (jika ada)
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Milyar)	42,88	27,99	Rendah	14,89 (turun)	70,87 (127,13)	Ada (0,28%)	Tidak ada data
	Rata-rata	42,88	27,99					

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dicapai. yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN), hal ini dikarenakan jumlah nilai investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2019 sebesar 27,99 Milyar Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) dengan realisasi 42,88 Milyar, hal ini berarti ada penurunan pada pencapaian di tahun 2019 yakni sebesar 14,89 M.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### 4.2 Saran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada untuk lebih bekerja keras mengumpulkan dan mengolah data yang terdapat dalam LKPM.
2. Melakukan survey langsung ke Perusahaan yang tidak melakukan entry data LKPM dan mendorong perusahaan supaya melaksanakan entry data LKPM terhadap jumlah investasi yang telah dilakukan.
3. Meminta data yang diperlukan untuk dilakukan entry data LKPM di Dinas DPMPTSP. (Strategi jemput bola).

4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
5. Kinerja personil petugas pelayanan dipertahankan dengan melakukan Bimtek Excelent service dalam hal pelayanan personil sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan.
6. Mempertahankan target-target yang sudah tercapai dan meningkatkan capaian kinerja atas target-target kinerja yang belum tercapai serta agar informasi mengenai data kinerja dapat diandalkan/dipercaya, namun perlu ditambah agar selanjutnya dimasukkan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II

- Instansi

:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
- Tugas

:

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
- Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal,

b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan

d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

e. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

f. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;terpadu satu pintu;

g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

h. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

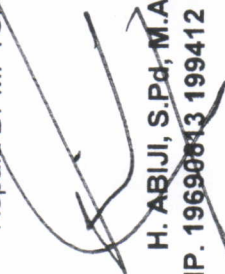
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan			Penanggung Jawab	Sumber Data
			Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Perhitungan Indikator		
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Untuk mengetahui realisasi investasi pertahun	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	DPMP TSP	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi PM dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi PM



2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	Dengan penyelesaian aduan/ keluhan pelayanan perizinan maka diharapkan terjadi perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat yang diinginkan.	Dengan adanya indikator tersebut untuk mengetahui sejauhmana layanan yang diberikan dan tetap terlaksanannya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.	<p>a. Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan, display touch screen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SMS Gateway;</p> <p>b. Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;</p> <p>c. Tingkat pengaduan yang rendah relatif mencerminkan bahwa pemohon izin sudah puas terhadap pelayanan yang diberikan.</p>	DPMPTSP	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
---	---	--	---	---	--	---------	--

Paringin, Januari 2019  
Kepala DPMPTSP



H. ABIJI, S.Pd, M.AP  
NIP. 19690813 199412 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ABIJI, S.Pd, M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si**

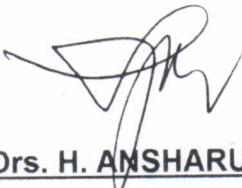
Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

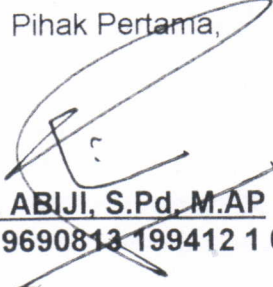
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
**Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si**

Paringin, September 2019

Pihak Pertama,

  
**H. ABIJI, S.Pd, M.AP**  
**NIP. 19690813 199412 1 002**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

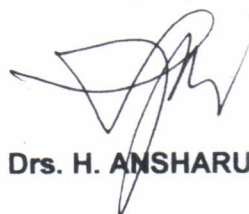
### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	45 Milyar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	83.50 % (A)
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	70 (B)
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,538,585,000.00	11 Kegiatan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 607,050,000.00	6 Kegiatan
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 84,000,000.00	4 Kegiatan
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 184,000,000.00	1 Kegiatan
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 52,050,000.00	2 Kegiatan
6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 202,200,000.00	4 Kegiatan
7	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 149,755,000.00	4 Kegiatan
8	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan	Rp 178,570,000.00	5 Kegiatan
9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	Rp 503,790,000.00	7 Kegiatan
Jumlah		Rp 3,500,000,000.00	44 Kegiatan

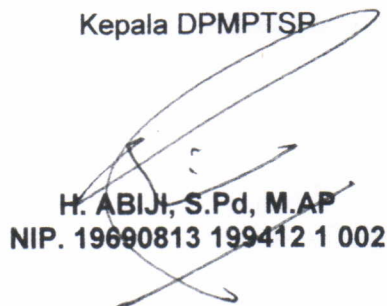
Paringin,      September 2019

Bupati Balangan



**Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si**

Kepala DPMPSTP



**H. ABIJI, S.Pd, M.AP**  
NIP. 19690813 199412 1 002